

Dr. ANTHON F. SUSANTO, S.H., M.Hum.



EDISI
REVISI

HUKUM

dari **Consilience**
ke **Paradigma Hukum**
Konstruktif - Transgresif

Endorsement:

"...penulis menawarkan model pemikiran yang berbeda dari model pemikiran yang sudah lazim di kalangan para pengemban hukum praktikal ataupun teoretikal pada umumnya." **Arief Sidharta** (Alm.)

"...saya merekomendasikannya sebagai bacaan alternatif dan mudah-mudahan dapat mengingatkan kita akan pentingnya usaha pencarian kebenaran di tengah krisis persepsi tentang hukum saat ini." **Esmi Warassih**

RF.HKM.159.02.2017

Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum.

HUKUM

***Dari Consilience ke Paradigma Hukum
Konstruktif – Transgresif***

Editor Penerbit : Anna

Desain Sampul: Hendra Kurniawan, S.Si.

Setting & Layout Isi: B. Wahyudi

Diterbitkan & dicetak oleh PT Refika Aditama

Jl. Mengger Girang No. 98, Bandung 40254

Telp. (022) 5205985, Fax. (022) 5205984

Email: refika_aditama@yahoo.co.id

refika.aditama@gmail.com

Anggota Ikapi

Cetakan Kedua (Revisi), September 2017

ISBN 978-602-6322-46-3

©2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini

TANPA IZIN TERTULIS dari penerbit.

The book cover features a dark, geometric design. A large, stylized lightbulb graphic is positioned on the right side, with its filament glowing. The background is a mix of dark and light gray tones with diagonal lines. The title 'KATA PENGANTAR' is printed in white, bold, uppercase letters on a dark horizontal band.

KATA PENGANTAR

Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H., M.H., (Alm.)

[Guru Besar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Parahyangan Bandung]

Buku berjudul "*HUKUM Dari Consilience ke Paradigma Hukum Konstruktif – Transgresif*", karya Anthon F. Susanto (selanjutnya disebut penulis) ini bukanlah buku studi *textbook* biasa untuk pemula yang sedang mempelajari hukum di Strata1 Fakultas Hukum. Buku yang substansi pembahasannya sudah *advanced* ini lebih merupakan bahan kajian untuk mereka yang sedang menempuh studi pada Strata 2 untuk mencapai Magister Hukum dan/atau pada Strata 3 untuk mencapai Doktor Hukum. Buku ini juga mengasumsikan pembacanya sudah mempelajari Ilmu Hukum (yang di Barat disebut juga Dogmatika Hukum), Filsafat Hukum dan Filsafat Ilmu, serta ilmu-ilmu lain yang terkait dengan studi hukum. Buku ini juga mengasumsikan pembaca yang terbuka untuk menyerap dan "mengunyah" hal-hal baru dan menerima kejutan-kejutan.

Buku ini memaparkan perjalanan intelektual penulis dalam mencari dan menemukan jalan keluar dari kemandekan kehidupan dan penyelenggaraan hukum di Indonesia yang dipahami dan dihayatinya sudah bertahun-tahun berada pada situasi keterpurukan dan belum memperlihatkan tanda-tanda akan berakhir atau akan bangkit dari keterpurukannya untuk memulihkan diri. Dalam perjalanan intelektualnya itu, penulis merasa beberapa kali mengalami perubahan mendasar dalam pemikiran dan pemahamannya

tentang hukum dan pemikiran ilmiah pada umumnya. Ia merasa telah mengalami titik balik melalui pertemuan dan interaksi dengan tiga intelektual Indonesia, yakni **I.S. Susanto (Alm.)** dan **Satjipto Rahardjo** di lingkungan studi hukum, dan fisikawan **Liek Wilardjo** dari lingkungan studi *Science* dan Filsafat Ilmu. Komunikasi intensif dan produktif dengan tiga tokoh cendekiawan tersebut memperkenalkan penulis pada karya para pemikir kontemporer tentang hukum dan Filsafat Ilmu, seperti **Descartes, Kant, Hegel, Nietzsche, Heidegger, Popper, Gadamer, Karl Kuhn, Habermas, Capra, Feyerabend, Derrida, Scholten, Dworkin, No Selznick, Unger, Sampford, de Sousa Santos**, dan sebagainya. Juga penulis berupaya menampilkan garis merah dalam perkembangan yang terjadi dalam dunia pemikiran.

Dalam pergulatan pemikiran dengan berbagai aliran dan teori-teori hukum yang dikemukakan oleh para filsuf hukum, sosiolog hukum, ilmu, dan para pakar ilmu lain terkait melalui buku-buku dan tulisan lain karya mereka, penulis merasa melihat bahwa kemandekan keterpurukan penyelenggaraan hukum di Indonesia itu disebabkan paradigma tentang hukum dan Ilmu Hukum yang dominan atau dominan, yakni Positivisme Hukum yang membelenggu pengembangan hukum di Indonesia, baik praktikal maupun teoretikal. Oleh karena untuk dapat keluar dari kemandekan dan keterpurukan penyelenggaraan hukum di Indonesia, maka diperlukan pengembangan teori-teori pemikiran-pemikiran tentang hukum yang mampu menembus melangkahi batas-batas yang dipatok oleh paradigma Positivisme Hukum yang dewasa ini sudah mencapai titik jenuhnya. Artinya, saat ini diperlukan untuk mengajukan suatu paradigma hukum yang yakni pemikiran baru tentang hukum yang berbeda dari yang dilazimkan sejak pertengahan Abad XIX, yakni pandangan tentang hukum yang positivistik. Dengan kata lain, sudah tiba saatnya bagi kita kemampuan kreativitas daya pikir yang akan mampu menghasilkan cakrawala-cakrawala baru yang akan membuka jalan bagi muncul paradigma hukum yang sesuai dan mampu mengakomodasi tuntutan dan kebutuhan-kebutuhan zaman yang semakin dinamis post-modern sekarang ini.

Upaya untuk menerobos batas-batas yang ditetapkan Positivisme Hukum sesungguhnya dapat dipandang sebagai bagian perlawanan terhadap positivisme pada umumnya (tuntutan-tan

beyond positivisme). Dalam lingkungan Filsafat Ilmu, gerakan menolak positivisme dipelopoei Popper, Kuhn, Gadamer, dan Feyerabend. Dalam bidang studi Ilmu Hukum muncul kepermukaan pemikiran-pemikiran dari Nonet-Selznick, Unger, Satjipto Rahardjo, dan Habermas. Lewat gagasan "*consilience*" yang diajukan oleh **Edward Wilson**, penulis mengajukan Paradigma Hukum Emansipatif dan Konstruktif Transgresif sebagai alternatif untuk Paradigma Positivisme Hukum yang sudah mencapai titik jenuhnya dan sudah kehilangan daya kreatifnya.

Lewat keyakinan tentang "tidak adanya kebenaran statis", penulis mengajak para pembaca untuk ikut bersama menempuh perjalanan intelektualnya berziarah dalam pencarian kebenaran untuk menemukan-gagasan-gagasan dan pemikiran-pemikiran yang dapat digunakan untuk membangun paradigma hukum yang kreatif bagi upaya mengakhiri kemandekan dan keterpurukan kehidupan hukum dan masyarakat di Indonesia, antara lain melalui pergumulan pemikiran dengan para pemikir dari lingkungan dekonstruksi yang ditokohi Derrida. Penulis yakin, bahwa dengan dekonstruksi terhadap dunia pemikiran yang dominan dan berakar pada paradigma positivistik yang sudah demikian mapan, maka akan tercipta peluang bagi upaya-upaya kreatif untuk merekonstruksi dunia pemikiran yang akan menumbuhkan paradigma baru dan harapan-harapan baru untuk masa depan. Dengan kata lain, penulis menawarkan model pemikiran yang berbeda dari model pemikiran yang sudah lazim di kalangan para pengemban hukum praktikal ataupun teoretikal pada umumnya.

Selamat berziarah dalam pencarian kebenaran....

DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN – v

PERCAKAPAN - *Aki-no-Hashi (1311)* – vii

KATA PENGANTAR - *Prof. Dr. Arief Sidharta, S.H., M.H., (Alm.)* – ix

KATA PENGANTAR - *Prof. Dr. Esmi Warassih, S.H., M.S.* – xiii

PENDAHULUAN – xvii

UCAPAN TERIMA KASIH – xxv

DAFTAR ISI – xxvii

DAFTAR RAGAAAN – xxxi

BAB I

MENGUBAH PERSEPSI TENTANG HUKUM	1
Problem Persepsi	1
Distorsi Komunikasi	4
Krisis Persepsi, Mungkinkah?	8
Krisis Identitas – Menuju Krisis Total	12
Mencari Titik Kosong	17

BAB II**DARI DOMAIN TERKOTAK****MENUJU PEMAHAMAN TERINTEGRASI**

Pendidikan & Status Keilmuan Ilmu Hukum

Mempertimbangkan Pendidikan Hukum Kritis

Dari Logika Binner Menuju Logika Kuantum

BAB III**TIGA TITIK BALIK**

Belajar dari yang Lain

Titik Balik Pertama

Titik Balik Kedua

Titik Balik Ketiga

Memulai Menulis (Teks) Hukum

BAB IV**PENGETAHUAN YANG TERSATUKAN***Consilience* - Petualangan & Pencerahan

Pandangan Dunia yang Hegemonial

Paradigma yang Mulai Tumbuh

BAB V**CONSILIENCE HUKUM**

Mendamaikan Pertentangan

Consilience Hukum - Sebuah Prasaran Imajinatif*Consilience* Penelitian Hukum*Consilience* Hukum dan Seni*Consilience* Hukum dan Moral (Etika dan Agama)

BAB VI**RELATIVITAS KEBENARAN****DAN ANARKISME METODOLOGI..... 135**

Dari Logos ke Logosentrisme 135

Pilihan Cara dan Anarkisme Feyerabend 144

Intelektualisme Klasik dalam Hukum..... 151

Induktivis Naif dalam Hukum dan Kontra Induksi
menurut Feyerabend 153

Menghilangkan Sikap Sektarian melalui "Apa Saja Boleh" 157

BAB VII**MENYOAL SIKAP DAN METODE KRITIS DALAM HUKUM..... 161**

Kemajemukan Makna 161

Berpikir Kritis & Nalar Kritis 166

Motif Berpikir Kritis 169

Nilai-Nilai Utama 173

Berpikir Kritis dan Kebebasan 175

Sikap Kritis & Integritas Ilmiah dari Paham Individual, Objektif,
atau Intersubjektif 176

Menyoal Dekonstruksi; Metode Aliran Kritis dalam Hukum 181

BAB VIII**REFLEKSI TENTANG HUKUM****MENUJU PARADIGMA ALTERNATIF..... 191**

Pencarian Tidak Pernah Usai 191

Memahami Hukum sebagai Wujud Emansipasi 195

Hermeneutika Hukum Konvensional

(Teks dalam Kerangkeng Aturan)	199
Otoritas di Belakang Tafsir	203
Hermeneutika Hukum Kontemporer	
(Otoritas yang Menyebar)	208
Paradigma Hukum Konstruktif–Transgresif (Sebuah Alternatif)	213
SENARAI PUSTAKA	225
INDEKS	233

Ragaan 6.1 Piramida Logos–Logosentris	
Ragaan 6.2 Proses Bernalar.....	
Ragaan 6.3 Reduksi Realitas	
Ragaan 8.1 Logos & Penafsiran.....	
Ragaan 8.2 Otoritas & Tafsir	
Ragaan 8.3 Model Relasi Hans Kelsen.....	

MENGUBAH PERSEPSI TENTANG HUKUM

BAB 1

"Find the Essence" (Roland Fishman)

Problem Persepsi

Sebagai mahasiswa yang baru memasuki Program Pascasarjana Ilmu Hukum, pada waktu itu persoalan yang dihadapi adalah '*problem persepsi*', sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dialami, meskipun pada kenyataannya merupakan gejala umum yang terjadi pada banyak orang yang baru belajar tentang hukum. Kita ambil satu pandangan hukum yang menyatakan bahwa hukum merupakan "*sekumpulan aturan atau seperangkat norma yang dibentuk oleh lembaga formal, dengan tujuan untuk mengatur masyarakat, yang apabila dilanggar mengakibatkan sanksi.*" Definisi demikian itu dapat dijumpai dalam banyak buku pengantar hukum tingkat awal. Apabila kemudian norma atau aturan tersebut berkontak dengan indra-indra tubuh kita sedemikian rupa sehingga menciptakan sesuatu dalam otak dan membentuk keadaan-keadaan mental yang merepresentasikan aturan-aturan/norma itu, apakah persepsi kita (misalnya) serta merta akan selaras dengan aturan yang kita baca/lihat tersebut? Apakah pikiran kita akan menerima begitu saja apa yang telah dituliskan dan diperintahkan aturan itu? Atau justru sebaliknya, karena otak dan indra pada dasarnya tidak hanya bersentuhan dengan norma semata, tetapi juga dengan realitas lain di seputar kita, apakah kemudian pikiran

atau otak kita akan menolak aturan/norma tersebut? Apakah hasil persepsi tentang norma akan *'berkesesuaian'* dengan realitas? Apakah norma itu juga mencerminkan realitas? Apakah itu? Apakah ini?

Terkadang indra menipu kita, sebut saja, saya melihat seorang yang sudah tua memukul seorang anak kecil, atau saya telah melihat (dalam penerangan yang kurang) bahwa x seorang wanita telah mencuri sesuatu, atau kita hanya melihat sekilas saja sesuatu yang ternyata luput dari perhatian. Kita tidak mampu menjamin apakah orang tua yang memukul anaknya itu (sesungguhnya) tengah memberikan pelajaran/mengajarkan sesuatu, atau pencuri (yang dilihat seperti wanita) sesungguhnya adalah waria/laki-laki berambut panjang. Indra kita terkadang tidak mampu menjangkau sesuatu yang ada di balik tirai, misalnya saja saya pernah melihat seorang hakim, polisi, jaksa, atau aparatur hukum lainnya beramal kebapakan, berwibawa, dan bertindak adil, tetapi tidak demikian akan ketika di belakang (tirai), semuanya berubah 180°, hakim yang kebabakan itu ternyata menerima suap (setelah di televisi tertangkap tangan oleh jaksa atau jaksa yang begitu bijak itu ternyata melakukan pemerasan (tentu tidak terdakwa)? Advokat yang penuh wibawa itu ternyata seorang mafia kasus (setelah dirinya tertangkap, kemudian menyerahkan sejumlah uang kepada hakim).

Semua (contoh tersebut) yang ada di belakang layar, memperlihatkan kondisi yang penuh ketidakpastian dan ketidakpangghahan. Sesuatu yang dipermukaan terlihat jujur, rapi, dan bersih ternyata dipenuhi oleh kebohongan. Tampilan muka tidak memperlihatkan apa yang ada di belakangnya. Hal ini persis (dalam contoh yang sama) ketika seorang politikus yang berambisi atas nama rakyat sambil melakukan pemerasan, atau menindas rakyat atas nama negara, atau mengatakan "tidak" kepada koruptor", tetapi di belakang semuanya ditangkap dan dipidana melakukan "korupsi". Tidak mungkin maksud untuk membuat kesimpulan bahwa "semua perilaku baik yang terlihat di depan televisi/tampilan muka di belakang mestilah baik". Kita tidak dapat membuat "generalisasi demikian, contoh tersebut hanya dimaksudkan untuk itu, namun penting untuk disadari bahwa indra kita terbatas untuk menjangkau sesuatu yang ada di belakang". Indra kita memang mampu menangkap sesuatu yang tersembunyi, dengan kata lain, kita memiliki batas-batas tertentu ketika mempersepsi realitas. Persepsi kita terbatas dalam menangkap makna yang dihasilkan oleh penerapan hukum oleh kita.

Apakah persoalannya hanya diakibatkan oleh indra kita semata? Tidak mudah untuk menjelaskan hal itu, terutama bagi mereka yang percaya betul terhadap cara-cara yang mengandalkan indra pengamatan. Contoh lain, ada banyak penjahat (umumnya kejahatan tingkat tinggi) yang bersembunyi (dengan nyaman) di balik aturan tertentu, sehingga tetap berada pada posisi terhormat seolah-olah perbuatannya dilegalkan undang-undang. Seorang penegak hukum yang memukuli demonstran karena dirinya menaruh dendam kepada orang itu, atau hakim yang menghukum seseorang dengan kalimat "demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", namun dirinya memutus setelah menerima "suap"? Bagaimana hal demikian dapat terjadi dan bagaimana dapat diselesaikan?

Apakah problem persepsi ini hanya menyangkut soal indra pengamatan secara langsung? atau (bisa jadi) kekeliruan terjadi ketika "rasio" ikut berperan dalam mengambil keputusan (memutuskan)? Mari kita alihkan persoalan ini pada apa yang kita kenal dengan "tugas sehari-hari seorang hakim dalam pemeriksaan perkara. Seorang hakim umumnya bukan pengamat langsung (*observer*) dalam perkara-perkara yang diajukan, kemudian diperiksa di ruang pengadilan, artinya hakim tidak mengalami sendiri peristiwa yang tengah diadilinya. Mungkin saja ada hakim yang pernah mengalami peristiwa serupa dengan kasus yang tengah diadilinya, tetapi itu tetap bukan sebuah amatan langsung. Kita tidak tengah berbicara tentang bagaimana cara atau prosedur untuk mengamati, tetapi berbicara tentang kecenderungan dan kemungkinan terjadinya kekeliruan hakim dalam memutuskan suatu persoalan terkait dengan indra pengamatan dan rasionya.

Artinya, kemungkinan besar hakim atau penegak hukum lainnya melupakan banyak hal dari fakta dan bukti yang ada di hadapannya. Terkadang, barang bukti telah ada di hadapan penegak hukum, dan faktanya telah jelas, tetapi terlewatkan dan tidak terlihat (luput) dari pandangan mereka. Kita patut khawatir tentang pernyataan penting sebagai berikut, "persepsi dan asumsi mereka tentu saja menentukan sudut pandang yang sudah jadi" yang dianggap oleh mereka sebagai "kebenaran"? **Christopher Chabris & Daniel Simons** (2010:13), memberikan penjelasan akurat tentang hal itu, bahwa "krisis persepsi" muncul sebagai akibat dari kurangnya perhatian pada objek tak terduga atau "*Kebutaan kurang perhatian*". Nama ini membedakannya dari bentuk kebutaan yang diakibatkan kerusakan sistem visual; bukan karena

dengan harapan bahwa bukti-bukti yang dihadirkan telah memperkuat putusan yang akan dan telah dikeluarkannya. Seorang pembohong yang lihai, tentu akan terlihat seperti orang jujur dan lugu di hadapan hakim. Mungkin saja kata-kata yang diucapkan di persidangan telah membuat hakim percaya tentang apa yang telah dikatakannya, terlebih apabila kata-kata itu didukung oleh bukti/fakta-fakta, sekalipun bukti dan fakta itu diperoleh dengan tidak benar (direkayasa).

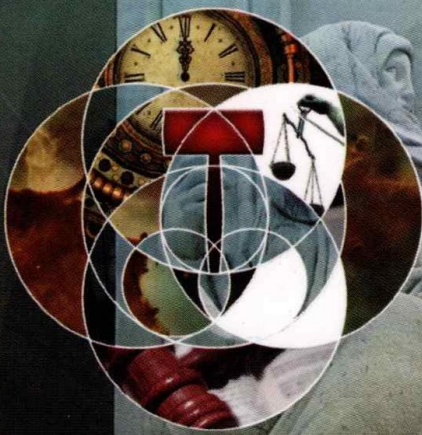
Sebagai contoh catatan/berita acara pemeriksaan, polisi akan selalu memperlihatkan fakta (seolah-olah) dapat dipertanggungjawabkan karena telah didukung oleh aturan perundangan yang sah, juga didukung oleh argumen seorang ahli, meskipun bisa saja peristiwa sesungguhnya tidak terjadi. Tidak dapat dipungkiri, banyak proses pemberkasan dalam banyak hal telah memuat dasar hukum secara lengkap, namun pada sisi yang lain ditemukan pula oleh kita, bahwa masih banyak fakta (sangat mungkin menentukan) yang belum terungkap, terlewatkan, atau sengaja dilewatkan, yang akhirnya terlihat penegak hukum menggunakan "aturan perundang-undangan" sekadar (untuk) memberikan kesan bahwa segala sesuatu telah dikerjakan secara matang dan penuh kehati-hatian serta legal. Bahkan (penulis menyaksikan dan mengamati), bagaimana peradilan merasa tidak terganggu/merasa nyaman ketika jaksa "menuntut" dengan dasar hukum yang jauh panggang dari api, bahkan yang lebih mengerikan menuntut dan mengadili berdasarkan pada fakta rekayasa (bentukan)? Mungkinkah?

Seorang hakim, atau aparat hukum lainnya sering kali menonjolkan keyakinannya, sebagai senjata pamungkas untuk memberikan penjelasan tentang apa yang diputuskannya, meskipun sebenarnya (saya lebih setuju) seorang hakim tengah berusaha meyakinkan dirinya akan problem yang tengah dihadapinya. Meyakinkan dirinya adalah sebuah "ketidakyakinan", atau menjadikan keyakinan sebagai kedok dalam memutus sebuah perkara. Hal itu berarti bahwa dirinya tidaklah yakin sebagaimana "akal budi", nurani dan intuisinya menyatakan secara tegas. Hal ini sepertinya mudah untuk dijelaskan, tetapi sangat sulit untuk dapat diterima atau dipahami dengan baik. Banyak hakim gagal menggunakan intuisi dan keyakinannya, sehingga (tidak jarang) putusannya menimbulkan kerugian luar biasa besar bagi pihak tertentu dan masyarakat. Hal itu terjadi karena adanya kekuatan paksa yang menimbulkan kegoncangan terhadap realitas. Bahkan (sekalipun intensitasnya tidak diketahui pasti), putusan menjadi sebuah sarana untuk melakukan sebuah tindakan jahat (law



Dr. Anthon F. Susanto, S.H. M.Hum., lahir di Bandung. Pendidikan yang telah diampunya: Program Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Unpas Bandung (1994), Program Pendidikan S2 Ilmu Hukum di Program Magister Ilmu Hukum UNDIP Semarang, dan Program Pendidikan S3 di Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP Semarang.

Saat ini, penulis bekerja sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Pasundan sejak 1996, dan menjadi Dosen Luar Biasa di beberapa perguruan tinggi lain di Indonesia; sebagai Asesor BAN PT; sebagai *reviewer* Simlitabmas Ristekdikti Kementerian Riset dan Teknologi sejak 2010; sebagai konsultan ahli dan peneliti *partner* di Mabes POLRI (2009–2011); sebagai Ketua Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI) (2017); sebagai Anggota Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminalogi Indonesia (MAHUPIKI); sebagai Tenaga Ahli Komisi Yudisial (2012–2016); dan sebagai Advokat dan Penulis.



HUKUM

dari **Consilience** ke **Paradigma Hukum** **Konstruktif – Transgresif**

Perubahan realitas saat ini membutuhkan pemikiran yang tidak ideologis dan sektarian, yaitu pemikiran yang luas, terbuka, dan kreatif sehingga dibutuhkan akselerasi pemikiran dan pandangan yang arif, didorong oleh semangat pencarian yang tidak pernah usai. Dengan demikian, seseorang harus mengubah pandangan yang tunggal, sederhana, dan absolut menjadi kritis dan menghargai keragaman. Hal ini sesuai dengan pandangan, bahwa kebenaran itu tidak statis, namun muncul dalam banyak hal secara berbeda, mulai dari identitasnya, pembicaraan, ekspresi, dan penampakkannya. Tidak akan ada manfaat apabila seseorang tidak berkeinginan untuk bangkit dari belenggu keyakinannya dan membebaskan diri dari kebutaan serta sektarian pemikirannya.

Buku ini tidak bermaksud untuk menyingkirkan pandangan yang telah ada (mapan) selama ini dalam hukum, juga tidak bermaksud menghilangkan hak-hak seseorang untuk berpikir dan memilih pandangan-pandangannya karena sejauh ini keterkaitan antara ideologi pribadi dengan pemikiran yang dihasilkannya sangatlah erat. Buku ini tidak bermaksud untuk memarginalkan kelompok tertentu dan membunuh kreativitasnya. Buku ini (hanya) merupakan ajakan dengan harapan tetap ada gagasan tentang kemanusiaan di masa mendatang dan akan melihat sebuah orientasi baru yang mengandung "kesadaran keduniaan" serta "kesadaran kosmis" dari jarak dekat yang memahami hukum tidak hanya sebatas kata-kata dan retorika sambil menyembunyikan kebenaran di belakangnya. Sebuah komitmen harus kita bangun, bahwa suatu aktivitas pemikiran yang bergerak dari subjek ke subjek lainnya, dengan menggunakan metode yang diyakininya sesuai dengan kebutuhan, serta dipandang bermanfaat bagi kehidupan yang lebih luas yang diusung oleh kebebasan berpikir, kreativitas, dan produktivitas yang saling memberi dan menerima akan menghasilkan banyak alternatif menuju masa depan yang lebih baik (meskipun kita tidak tahu seperti apa itu).

